

**PEN GAR UH KE JE LA SAN SASA RAN ANGGA RAN,  
PEN GENDAL IAN AKUN TANSI, DAN SISTE M  
PE LA PORAN TERHADAP AKUN TABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
DEBY FEBRIANI  
198330014**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/23

**PEN GARUH KE JE LA SAN SASARAN ANGGARAN,  
PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM  
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
DEBY FEBRIANI  
198330014**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/23

**PEN GARUH KE JE LA SAN SASA RAN ANGGA RAN,  
PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM  
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

Oleh :

**DEBY FEBRIANI**

**198330014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/23

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Kuntansi,  
dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Daerah (studi emperis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo)

Nama : Deby Febriani

NPM :198330014

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

  
(Desy Astrid Anandya, SE, M.Ak)

Pembimbing

  
(Aditya Amanda Pane, SE, M.Si)

Pemanding

Mengetahui

  
(Ahmad Rafiki, BBA, MM., Phd)

Dekan

  
(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus: 18 September 2023

## **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

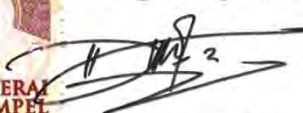
Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deby Febriani  
Npm : 198330014  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo) ”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 22 September 2023  
Yang menyatakan



  
**Deby Febriani**  
**198330014**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of clarity on budget targets, accounting controls, and reporting systems on the performance accountability of local government agencies (an empirical study on regional work units in Karo Regency). The type of research used is quantitative. The population in this study are all government agencies in Karo District. The sample in this study is the work unit of the regional apparatus which totals 45 SKPD. The criteria for respondents in this study were 45 employees of regional work units in charge of the finance department who were directly involved in the preparation, implementation and accountability of budgets in each agency. The data source used in this research is primary data by collecting quantified answers to questionnaire questions. The technique used by researchers to collect data by means of interviews, observation, and distributing questionnaires containing questions about indicators regarding performance accountability of local government agencies. This research uses validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroskedasticity test, multiple linear regression analysis test, t test, f test, R2 test. The results of this study indicate that the clarity of budget targets has a positive and significant effect on the performance accountability of local government agencies, accounting control has a positive and significant effect on the performance accountability of local government agencies, and the reporting system has a positive and significant effect on the performance accountability of local government agencies. From the results of the F test, the F-count value is (21.707) > Ftable (2.832) and significance (0.000) <  $\alpha$  (0.05). Based on the test rules, it can be concluded that simultaneously the clarity of budget targets, accounting controls, and reporting systems have a positive and significant effect on performance accountability of local government agencies.*

**Keywords:** *Clarity of Budget Targets, Accounting Control, Reporting Systems, and Performance Accountability of Local Government Agencies.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (studi emperis pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karo). Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah yang berada di Kabupaten karo. Sampel pada penelitian ini adalah Satuan kerja perangkat daerah yang berjumlah 45 SKPD . kriteria responden penelitian ini adalah 45 pegawai satuan perangkat kerja daerah yang bertugas di bagian keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing instansi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dengan mengumpulkan jawaban pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang di kuantitatifkan. Teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara interview, observasi, dan menyebarkan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedstisitas, uji analisis regresi liner berganda, uji t, uji f, uji  $R^2$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dari hasil uji F didapat nilai F-hitung (21,707) > Ftabel (2,832) dan signifikansi (0,000) <  $\alpha$  (0,05). Berdasarkan aturan pengujian dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintan daerah.

**Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.**



## RIWAYAT HIDUP



Nama	<b>Deby Febriani</b>
NPM	<b>198330014</b>
Tempat, Tanggal Lahir	<b>Medan, 07, Februari, 2000</b>
Nama Orang Tua:	
Ayah	<b>Dedi Lesmana</b>
Ibu	<b>Yeni Agustini</b>
Riwayat Pendidikan:	
SMP	<b>SMP N 22 MEDAN</b>
SMA/SMK	<b>SMK Swasta YPK Medan</b>
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalaman Pekerjaan	-
No. HP/WA	<b>085275207687</b>
Email	<b><u><a href="mailto:debbyfebriany9@gmail.com">debbyfebriany9@gmail.com</a></u></b>

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Adapun judul skripsi dari penelitian ini adalah : “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area . Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khususnya yang Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat dikagumi dan dicintai Ayah Dedi Lesmana dan Ibu Yeni Agustini yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan nasihat serta semangat yang tulus hingga saat ini, kemudian Terima kasih kepada Adek Andrhe Gusthara yang telah memberikan doa dan semangat serta dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.ss
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA, MMgt, PhD, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Desy Astrid Anindya, SE., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan masukan-masukan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Aditya Amanda Pane, SE., M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan kritik dan saran selama seminar berlangsung untuk melengkapi skripsi penelitian
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mengajar dan membantu sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.

8. Terimakasih kepada pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini terutama om Nanang.
9. Seluruh teman-teman A1 2019 khususnya Michele Ramadhani yang selalu mendukung proses skripsi ini, semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita.

Dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya. Dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Akhirnya, segala bantuan yang diberikan dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu yang diperoleh dapat disumbangkan kepada agama, nusa, dan bangsa Amin.

**Medan, 22 Mei 2023**

**Penulis**



**Deby Febriani**

**NPM : 198330014**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Penetapan Tujuan ( Goal Setting Theory) .....	10
2.1.2 Teori Agency (Agency Theory).....	11
2.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
2.2.1 Akuntabilitas.....	12
2.2.2 Kinerja Instansi Pemerintah.....	13
2.2.3 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	14
2.2.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran .....	17
2.3.1 Anggaran.....	17

2.3.2 Kejelasan Anggaran .....	18
2.3.3 Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran .....	19
2.3.4 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran .....	22
2.4 Pengendalian Akuntansi .....	23
2.4.1 Defenisi Pengendalian Akuntansi .....	23
2.4.2 Indikator Pengendalian Akuntansi .....	25
2.4.3 Pengendalian Akuntansi Di Pemerintahan.....	26
2.5 Sistem Pelaporan .....	27
2.5.1 Definisi Sistem Pelaporan Kinerja .....	27
2.5.2 Indikator Sistem Pelaporan .....	29
2.5.3 Pentingnya Laporan Kinerja .....	30
2.6 Penelitian Terdahulu.....	31
2.7 Kerangka Konseptual .....	33
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	34
2.8.1 Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	34
2.8.2 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	35
2.8.3 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	35
2.8.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Desain, Objek dan WaKtu Penelitian.....	39
3.1.1 Desain Penelitian.....	39
3.1.2 Objek Penelitian .....	39
3.1.3 Waktu Penelitian .....	40
3.2 Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian.....	40
3.2.1 Variabel terikat (Dependent Variable) .....	41

3.2.2 Variabel bebas (Independent Variable).....	42
3.3 Skala Pengukuran Variabel .....	44
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
3.4.1 Populasi Penelitian .....	44
3.4.2 Sampel Penelitian.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Teknik Kualitas Data .....	47
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	47
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
3.6.3 Uji Kualitas Data.....	48
3.6.4 Uji Validitas .....	48
3.6.5 Uji Reliabilitas .....	49
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	49
3.7.1 Uji Normalitas .....	49
3.7.2 Uji Multikolinieritas.....	50
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas.....	51
3.8 Uji Hipotesis.....	51
3.8.1 Uji Statistik (Uji T) .....	52
3.8.2 Uji Kelayakan (Uji F).....	53
3.8.3 Uji Koefisien Determinan (R <sup>2</sup> ).....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Deskripsi penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Karo .....	54
4.1.2 Visi Dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo .....	55
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian .....	57
4.1.4 Gambaran Umum Responden .....	58
4.2 Hasil Analisis Deskriptif Jawaban Responden.....	59

4.2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran .....	59
4.2.2 Pengendalian Akuntansi (X2) .....	62
4.2.3 Sistem Pelaporan (X3) .....	67
4.2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	70
4.3 Hasil Uji Kualitas Data .....	75
4.3.1 Hasil Uji Validitas .....	75
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas .....	77
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	78
4.4.1 Hasil Uji Normalitas.....	78
4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas .....	80
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	81
4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	82
4.6 Pengujian Hipotesis.....	84
4.6.1 Hasil Uji Simultan (Uji-F).....	84
4.6.2 Uji Signifikan Secara Parsial (Uji-t).....	85
4.6.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	86
4.7 Pembahasan.....	87
4.7.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	87
4.7.2 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah .....	89
4.7.3 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	91
4.7.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah .....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

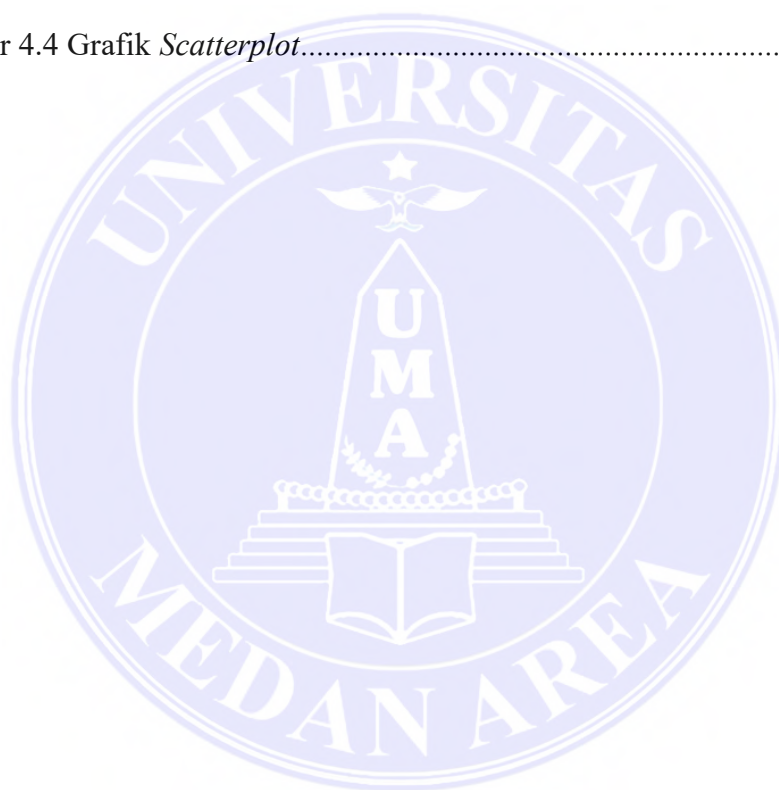


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Waktu penelitian .....	40
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	42
Tabel 3.3 Populasi Penelitian .....	45
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Responden Penelitian.....	58
Tabel 4.2 Kejelasan sasaran anggaran X1 .....	60
Tabel 4.3 Pengendalian Akuntansi X2.....	63
Tabel 4.4 Sistem Pelaporan X3 .....	67
Tabel 4.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Y .....	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Item-Total Statistik.....	76
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas .....	78
Tabel 4.8 Uji Statistik dengan Kolmogorov sminov .....	78
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas .....	80
Tabel 4.10 Uji Glejser .....	81
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	83
Tabel 4.12 Uji Signifikan Secara Serempak (Uji-f) .....	84
Tabel 4.13 Uji Signifikan Secara Parsial (Uji-t) .....	85
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi.....	86

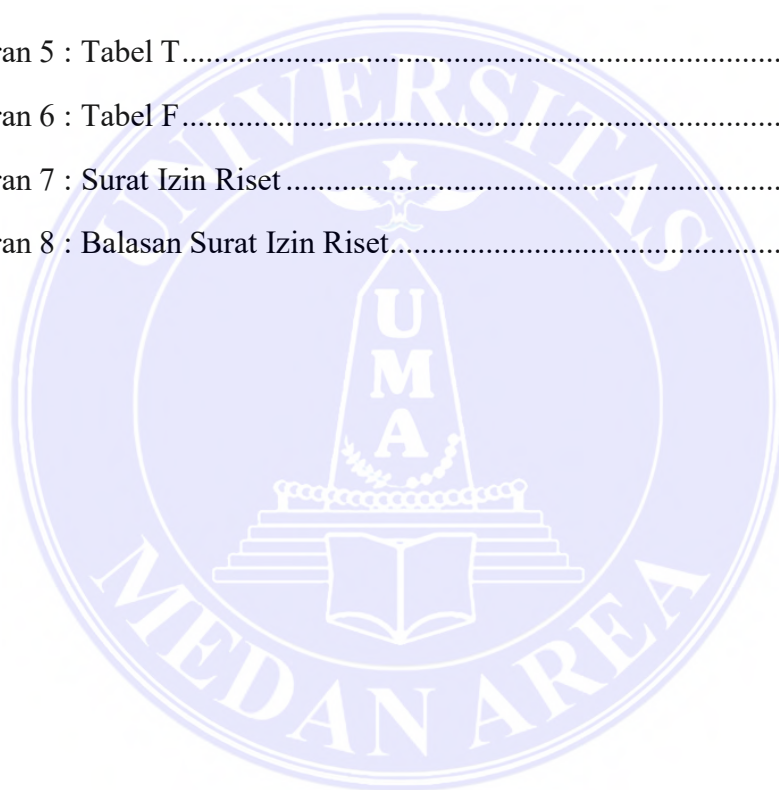
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 4.2 Grafik Histogram .....	79
Gambar 4.3 P-Plot.....	80
Gambar 4.4 Grafik <i>Scatterplot</i> .....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.....	105
Lampiran 2 : Hasil Ouput Analisis Deskriptif Jawaban Responden .....	110
Lampiran 3 : Hasil Ouput Uji SPSS.....	116
Lampiran 4 : Tabel R .....	122
Lampiran 5 : Tabel T.....	123
Lampiran 6 : Tabel F.....	124
Lampiran 7 : Surat Izin Riset .....	126
Lampiran 8 : Balasan Surat Izin Riset.....	127



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kinerja suatu instansi pemerintah merupakan gambaran tujuan dan tingkat pencapaian suatu instansi pemerintah, sebagai gambaran misi, visi, dan desain instansi tersebut, yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan. Setelah keputusan pembentukan masyarakat layanan. Melalui evaluasi kinerja, pemerintah akan dapat memutuskan berbagai cara untuk mempertahankan atau memaksimalkan kinerjanya. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja yang seharusnya dilakukan dengan kinerja yang diharapkan, dimana laporan kinerja harus mencerminkan status kinerja instansi pemerintah. (Deni Harianto, 2021).

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan, diharapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat tercapai. Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk akuntabilitas yang mengacu pada siapa yang menjadi tanggung jawab suatu organisasi (atau individu pekerja) (Wati, 2016).

Persyaratan akuntabilitas lembaga pusat dan publik Daerah mendorong semua instansi pemerintah untuk mengembangkan rencana secara strategis mengukur dan melaporkan kinerja. sebagai sebuah organisasi Sektor publik,

pemerintah daerah harus memiliki kinerja yang tinggi Dipandu oleh kepentingan sosial, mendorong pemerintah selalu tanggap terhadap lingkungan dan berusaha memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas (Ramadhani, 2022).

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terkait dalam penggunaan anggaran diwajibkan untuk dapat dilakukan pengukuran dan dinyatakan keterkaitannya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, setiap kegiatan harus memiliki indikator yang jelas sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut khususnya bagi masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) sebagai pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) terhadap aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan (Mardiasmo, 2019).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2019). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden no 63 Tahun 2017 dan UU no 11 tentang kesejahteraan sosial. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 Tahun 2020, pemberi bansos adalah Satuan Kerja Pada Kementerian atau Lembaga pada Pemerintah Pusat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintahan Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah membuat beberapa program bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Seperti halnya pada tahun 2022 kabupaten karo dimasa pandemi penyebaran Covid-19 telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berasal dari Kementerian Sosial berjumlah Rp. 600.000. Namun banyak masyarakat yang merasa penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya, ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun tidak dapat, bahkan masyarakat yang hidup dengan ekonomi menengah ke atas tak jarang masih terdata. Pada tahun 2023 penyaluran bantuan sosial lagi-lagi menjadi masalah. Masyarakat Desa Lau Baleng Kabupaten Karo, mempermasalahkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diduga tidak tepat sasaran. Masyarakat mempertanyakan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Pasalnya banyak masyarakat yang umumnya lasian dan sulit ekonomi tidak terdaftar dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Setelah ditelusuri sebagian besar yang

mendapatkan bantuan tersebut adalah masyarakat dengan taraf ekonominya sangat memadai. Namun, tentunya yang lebih berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. (<https://medan.tribunnews.com>, 2020)

Pengendalian akuntansi adalah sistem pengendalian yang berbasis akuntansi. Pengendalian akuntansi pemerintahan akan membantu perintah merumuskan pengambilan keputusan yang lebih baik, pengendalian operasi yang lebih efektif, kemampuan untuk memperkirakan biaya keberhasilan dan profitabilitas dan memilih alternatif terbaik dalam setiap situasi dan masalah untuk meningkatkan kinerja. Mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian akuntansi, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (<https://ekonomi.republika.co.id>, 2018)

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat memantau dan mengontrol kinerja manajer dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan dan informasi lain yang akan digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Permendagri no 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi

keuangan daerah, dan informasi daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem Pelaporan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten saat ini dalam proses pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran daerah sudah menerapkan atau menjalankan sesuai dengan permendagri no 70 tahun 2019 di mana seluruh mekanisme pelaporan kinerja atau pertanggungjawaban pengelolaan anggaran daerah sudah digitalisasi dengan tujuan lebih transparan.

Akuntabilitas kinerja tidak dapat dipisahkan dari sistem yang membentuknya. akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serangkaian sistem dimana Menerapkan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, laporan kinerja hingga pemanfaatan atas informasi kinerja yang diperoleh untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Dengan kata lain, sistem akuntabilitas kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara aktual (Susilo, 2019)

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Karo masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini dapat diketahui dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun 2020 sampai tahun 2021 memperoleh nilai kurang baik. penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil



di pemerintahan Kabupaten Karo masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Menurut (Mardisar, 2017) akuntabilitas merupakan dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha menyelesaikan kewajibannya dan mempertanggungjawabkan semua tindakan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Dimensi akuntabilitas meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas akuntabilitas finansial dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) adalah kewajiban pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan

berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah direncanakan pada tahun anggaran dan juga sebagai pedoman dalam menyusun program pada tahun-tahun berikutnya. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan aparat dalam mencapai tujuan instansi pemerintah dan pengambilan keputusan yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para aparatur daerah dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Sistem pelaporan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas , maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini menjadi berikut:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo?

2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo?
4. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Daerah Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
4. Untuk mengetahui Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Daerah Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi akademis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan dan memperluas wawasan dalam bidang akuntansi pemerintah serta menjadi bukti emperis mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 2. Bagi Universitas Medan Area

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan peneliti atau refensi bagi peneliti selanjutnya apabila terdapat peneliti yang meneliti masalah yang sama dengan obyek penelitian yang berbeda, ataupun dengan obyek yang sama dengan penelitian ini.

### 3. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam menyusun penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Ada beberapa teori dasar yang dapat menjelaskan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diantaranya adalah teori penetapan tujuan dan teori agency (*agency theory*). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing teori tersebut:

##### 2.1.1 Teori Penetapan Tujuan ( Goal Setting Theory)

Teori penetapan tujuan atau goal setting theory adalah teori mengenai proses yang melibatkan individu-individu suatu organisasi dalam penentuan atau penetapan sasaran kerja yang akan dilaksanakan. Sasaran atau target bisa ditambah dengan memberi penjelasan atau informasi kepada individu atau tenaga kerja mengenai bagaimana mengerjakan tugas tersebut, mengapa tugas tersebut penting untuk dikerjakan dan memberikan keyakinan atas tercapainya sasaran kerja (Mertyani Sari Dewi, 2020).

Teori penetapan tujuan atau goal setting theory dikemukakan oleh Locke Latham (1991). Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). *Goal setting theory* menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan memiliki kemampuan

dan ketrampilan kerja. Tuntutan akuntabilitas atas instansi-instansi publik, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami instansi harus dipublikasikan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang transparan. Dengan pendekatan goal setting theory, laporan akuntabilitas kinerja diasumsikan sebagai tujuan pemerintah daerah, sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan sebagai faktor penentunya. Apabila faktor-faktor penentu ini secara baik diterapkan di instansi maka tujuan pemerintah daerah akan tercapai (Devika Diah Precelina, 2019).

### 2.1.2 Teori Agency (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*), yaitu penerima amanah (*agent*) dengan pemberi amanah (*principal*). Dalam hal ini pemberi amanah (*principal*) memberikan wewenang kepada penerima amanah (*agent*) untuk membuat keputusan terbaik, disini agent melakukan jasa untuk dan atas nama principal. Dalam sektor publik teori keagenan sudah terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Retnowati dkk, 2020)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2019).

Di sini agen berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas kepada principal. bagi pengguna selaku pemberi amanah, pelaporan keuangan digunakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah sebagai penerima amanah. Untuk mencapai prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010

## **2.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **2.2.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Nur Anisa, 2019)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban atas pekerjaan individu atau unit organisasi, melalui laporan pertanggungjawaban

kinerja secara berkala, dalam rangka pencapaian tujuan, dan pengelolaan sumber daya yang dialokasikan dan dikendalikan. Dalam konteks ini, sumber daya adalah fasilitas tambahan yang diberikan kepada individu atau unit organisasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya (saffanah, 2022)

### 2.2.2 Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*Strategic Planning*) suatu organisasi. Dengan demikian, kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauhmana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif/tidak efektif harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja. (Suwandi, 2019)



### 2.2.3 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem mempertanggungjawabkan secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) (Nasihudin, 2018).

Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah diatur dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999. Akuntabilitas juga dapat dinyatakan sebagai perwujudan pertanggungjawaban individu atau unit organisasi, dalam Kelola sumber daya yang ada diberikan dan dikendalikan, untuk tujuan dicapai melalui Media berupa laporan pertanggungjawaban melakukan secara teratur. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit oraganisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Membentuk Sumber daya ini umumnya sumber daya manusia, pendanaan, Infrastruktur dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum politik (Fauzan, R.H. 2017).

Konsep akuntabilitas dalam arti luas juga memberikan pengertian bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat, media massa, lembaga swadaya

masyarakat, serta stakeholders lain. Menurut Mardiasmo (2019) terdapat empat aspek yang diukur dalam akuntabilitas publik, yaitu: Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program. Keputusan direktur institut Nomor Peralatan Nasional (LAN) 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman menyiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, menjelaskan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah adalah Demonstrasi Kewajiban Institusional pemerintah untuk mengambil tanggung jawab sukses dan gagal menjalankan misi organisasi mencapai tujuan dan sasaran pengaturan sistem yang lulus bertanggung jawab secara teratur.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (LAN: 2003):

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi , serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### 2.2.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut (Khaismawati, 2023) menjelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat di ketahui indikatornya yaitu:

1. Pemahaman kejelasan sasaran anggaran suatu program sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut
2. Penetapan visi dan misi sesuai dengan rencana strategik organisasi, sebagai alat penting dari perencanaan strategis, dan dengan demikian membantu membentuk strategi yang akan digunakan oleh organisasi untuk mencapai masa depan yang diinginkan
3. Penetapan indikator kinerja untuk setiap kegiatan, sebagai tanda yang berfungsi untuk alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) dan telah selesai dilaksanakan.
4. Analisis keuangan, tujuan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakn. Analisis ini dapat digunakan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam hal cara memahami laporan keuangan, menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, mengevaluasi laporan keuangan dan menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Dengan analisis laporan keuangan tersebut, pengguna laporan

keuangan akan memperoleh informasi mengenai akuntabilitas keuangan daerah, kekayaan daerah, dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

5. Pembuatan laporan kegiatan, sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan.

Pembuatan laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika sebuah acara atau kegiatan telah selesai dilaksanakan.

6. Pengecekan jalannya program atau kegiatan yang sedang dijalankan.

7. Pengendalian pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.

8. mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada dimasyarakat.

9. Kegunaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

10. Kaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kegiatan,

## **2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran**

### **2.3.1 Anggaran**

Menurut Arfian, (2016) Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu

tertentu yang dinyatakan dalam suatu finansial. anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik melakukan perbedaan krusial antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran (Bastian, 2023). Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah melihat cara pelaksanaan anggaran yang sudah dibuat dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan kepatuhannya. (M handayani, 2019)

### 2.3.2 Kejelasan Anggaran

Menurut (Aziz, F. 2023) Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana sasaran anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik, dengan tujuan agar anggaran dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab untuk mencapai sasaran anggaran. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah Hal ini sesuai dengan pendapat Supardi S, (2016),

yang menyatakan bahwa praktik otonomi daerah adalah penggunaan sumber daya yang ekonomis, efisien dan efektif yang memberikan akuntabilitas publik, yang menyatakan akan digunakan secara adil dan merata untuk Diperlukan anggaran untuk mengelola sumber daya tersebut dengan baik agar dapat mencapai kinerja yang diharapkan masyarakat dan menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat.

Menurut (Arya Kusuma, 2021) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada ketetapan anggaran belanja. Artinya bahwa semakin besar kejelasan sasaran anggaran yang diberikan maka semakin tinggi pula tercapainya ketepatan anggaran pendapatan dan belanja, hal ini disebabkan karena adanya sasaran anggaran yang jelas maka pegawai dapat membandingkan apa yang telah dilakukan dengan sasaran anggaran itu sendiri, dan kemudian menentukan dimana posisinya saat ini, yang akan menimbulkan sebuah motivasi tersendiri bagi pegawai untuk berusaha lebih baik dalam mencapai sasaran anggaran yang telah ditetapkan.

### **2.3.3 Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2017) yang menyatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien,

efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Menurut (Ramandei, 2017) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan insyansi sector public untuk meangalokasikan sumber daya yang dimiliki,, terdapat beberapa karekteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam rencana strategik daerah (renstrada) dan program pembangunan daerah (properda). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifikasi dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya, oleh sebab itu Kejelasan Sasaran Anggaran dapat dilihat dari besar atau kecilnya pengaruh dalam merumuskan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan Sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran diperkirakan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (Hafzhan, 2021).

Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan organisasi sektor publik dalam menyusun rencana kegiatan dengan tujuan tercapainya target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, dengan kata lain kejelasan sasaran anggaran yang telah ditetapkan akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti dengan kata lain ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan tidak akuntabelnya kinerja instansi pemerintah (Safitri, N.H. 2020)

Dalam dokumen penyusunan anggaran daerah yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD harus sungguh-sungguh dalam menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. (Putra, B.A, dkk 2016) menyatakan bahwa tujuan dan sasaran APBD tersebut harus disesuaikan dengan lima kriteria yaitu Spesifik, Terukur, Menantang tapi



realistis,Memiliki batas waktu. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran akan susah untuk meimplementasikan anggaran yang ada. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

### **2.3.4 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran**

Menurut (Widiya Restu, 2017:18) indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian rencana kerja dan anggaran RAPBD, merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD yang disesuaikan dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD)
2. Sasaran anggaran yang jelas & spesifik, sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.
3. Keahlian dan pengetahuan, tujuan dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran rencana bisnis dan anggaran (RBA).
4. Faktor yang mendukung tujuan instansi, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan faktor dominan yang dapat membantu atau mendukung tujuan-tujuan instansi secara efektif dan efisien.

5. Ketetapan anggaran dengan realisasi, jumlah anggaran yang disusun sama dengan jumlah anggaran yang direalisasi serta digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif dan efisien.

## 2.4 Pengendalian Akuntansi

### 2.4.1 Defenisi Pengendalian Akuntansi

Menurut (Pratama. dkk, 2019) pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. Sedangkan menurut (Paramitha, 2016) pengendalian akuntansi merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu. Menurut (Depari, R. P 2021) mendefinisikan pengendalian akuntansi adalah Pengendalian yang berdasarkan pada angka-angka akuntansi seperti anggaran, standard costing, dan fleksibel budgeting. Pengendalian sangat berguna untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

Menurut (Reyhan Hady, 2017) pengendalian (control) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksana. Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan bagi organisasi, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai rencana. Pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk memelihara atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini, pengendalian akuntansi disertakan adalah sistem

perencanaan, sistem pelaporan, dan program pemantauan berbasis informasi. Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan (Mulyadi, 2019). Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk organisasi, pengendalian harus ada sehingga keputusan dapat dibuat sesuai dengan rencana.

Pengendalian Akuntansi Menurut (Krismiaji, 2010:18) menjelaskan bahwa pengendalian akuntansi berkaitan dengan rencana dan prosedur organisasi dan catatan mengenai perlindungan aset dan keandalan catatan keuangan, karena dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

1. Transaksi yang dilakukan berdasarkan otorisasi administratif umum atau khusus.
2. Catatan transaksi diperlukan untuk memungkinkan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau standar lainnya Terapkan untuk pelaporan tersebut dan pertahankan akuntabilitas aset.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi adalah rencana, prosedur, dan sistem pelaporan yang berkaitan dengan perlindungan aset atau aset organisasi.

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala instansi pemerintah daerah membuat keputusankeputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien (S wineh, 2005). Komitmen organisasi yang kuat di dalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha

keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasinya.

#### **2.4.2 Indikator Pengendalian Akuntansi**

Menurut (Atika Hasanah, 2021) Indikator Pengendalian Akuntansi Untuk mencapai tujuan Pengendalian Akuntansi diukur menggunakan 9 indikator yaitu:

1. Audit sebagai alat pengambil keputusan, audit atau pemeriksaan intern digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.
2. Evaluasi sistematis, evaluasi yang sistematis dan terjadwal tidak digunakan sebagai dasar alat pengambi keputusan.
3. Penetapan target anggaran digunakan sebagai dasar alat pengambil keputusan.
4. Rencana Jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang sebagai dasar alat pengambilan keputusan
5. otorasi pada transaksi, transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.
6. Bukti pendukung setiap transaksi, dokumen tertulis yang mencatat dan merekam seluruh transaksi yang terjadi pada kegiatan keuangan. Hal ini penting karena dapat mencegah timbulnya masalah dalam hal keuangan dengan pihak yang terkait di waktu mendatang, dan harus selalu didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.

7. Pencatatan transaksi, keuangan pemerintahan daerah merupakan proses pencatatan atas suatu kejadian di dalam anggaran yang menghendaki adanya pencatatan secara kronologis, teratur dan sistematis sehingga menyebabkan adanya perubahan pada harta, utang dan modal sehingga transaksi telah dicatat dalam buku catatan akuntansi.

8. Pembaharuan catatan akuntansi, catatan akuntansi dijaga untuk tetap “*up-to-date*”.

9. Persetujuan laporan keuangan oleh kepala bagian keuangan, laporan-laporan keuangan di review dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan.

### **2.4.3 Pengendalian Akuntansi Di Pemerintahan**

Pengendalian akuntansi juga merupakan unit pertanggungjawaban atas kinerja yang baik di instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi akan membantu pemerintah merumuskan Pengambilan keputusan yang lebih baik, pengendalian operasi yang lebih efektif, kemampuan untuk memperkirakan biaya keberhasilan dan profitabilitas Dan memilih alternatif terbaik dalam setiap situasi dan masalah untuk meningkatkan kinerja. meningkatkan perencanaan dan Pengendalian kegiatan melalui perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan Informasi dan Pengungkapan Aktivitas dan Kinerja Keuangan pemerintah Daerah.

Menurut (Darma, 2019) mengemukakan bahwa salah satu jenis pengendalian adalah penggunaan sistem akuntansi untuk pengendalian keuangan. Target Hal ini untuk memastikan bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan anggaran dilakukan dan untuk memastikan integritas keuangan kegiatan organisasi. Menurut (Wahyu, P. 2019) dalam konteks otonomi daerah, pendelegasian tanggung jawab kepala daerah kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawahnya setidaknya memiliki dua poin penting dalam melaksanakan suatu sistem pengendalian akuntansi. Adapun penerapannya adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang dibuat kepala OPD.
2. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala OPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan lebih efisien dan efektif.

## **2.5 Sistem Pelaporan**

### **2.5.1 Definisi Sistem Pelaporan Kinerja**

Menurut (Sazi Wea, 2021) Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut (Indra Bastian, 2010 : 297) “pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus

dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja”. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik, dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sistem dan proses pelaporan kinerja, sebagai subsistem dari penerapan sistem manajemen internal di instansi pemerintah, juga harus terus dibangun dan dikembangkan untuk mencapai tujuan menghasilkan informasi. Saat ini, pengembangan sistem pelaporan kinerja tampaknya tertinggal Pembangunan sistem pelaporan keuangan. Hal ini dapat dimengerti karena program yang "menangkap" data, mencatat, dan mengumpulkan informasi keuangan semuanya dikembangkan dengan cara ini. Untuk mencapai kesepakatan dan standar atau standar dalam mengelola informasi keuangan. Di sisi lain, pengelolaan informasi kinerja tampaknya sulit diatur karena fitur-fiturnya yang melekat. Oleh karena itu, panduan dan instruksi atau modul pembelajaran dapat digunakan sebagai standar Persiapan laporan yang baik (Hafzhan, 2021).

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

### 2.5.2 Indikator Sistem Pelaporan

Indikator sistem pelaporan dalam penelitian (Khairun Nisa, 2020) yaitu :

1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap, penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu instansi. Catatan informasi keuangan suatu instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja instansi tersebut dan dengan menyajikan laporan keuangan secara lengkap.
2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi, Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi telah memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi dimasa lalu.
3. Informasi keuangan disajikan memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus.



4. Laporan keuangan dapat diuji, menunjukkan sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan, perputaran modal, transaksi, dan lain-lain. Faktor ini adalah untuk membantu memberikan gambaran nyata atau realita yang tersaji dalam informasi akuntansi.

5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

### 2.5.3 Pentingnya Laporan Kinerja

Saat ini, manajer publik semakin menuntut ketersediaan informasi kinerja. Informasi kinerja selalu dibutuhkan oleh pimpinan atau pejabat pemerintah ketika berhadapan dengan pihak lain, seperti DPRD/DPRD, wartawan dari berbagai media, LSM/LSM dan atasannya masing-masing. Penguasaan informasi kinerja pemimpin adalah hal yang mutlak, dan pemimpin harus diingat ketika memberikan informasi kinerja. Tentang kinerja lembaga dan unit kerja yang menjalankan tugas atau pimpinannya. Untuk mendapatkan informasi kinerja ini, sistem pengumpulan data harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan Laporan untuk berbagai tujuan (M.Hafzhan 2021)

Laporan kinerja adalah salah satu laporan yang harus disiapkan untuk kepentingan baik pimpinan instansi maupun pihak eksternal. Ini secara luas relevan dengan laporan keuangan. Secara khusus, laporan kinerja yang merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja, disusun setiap tahun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan kinerja yang dipersyaratkan oleh instansi pemerintah saat ini didasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja untuk periode pelaporan triwulanan dan tahunan, dan Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Badan Untuk pemerintah, laporan kinerja meliputi laporan kinerja interim (laporan kinerja interim dilakukan setiap triwulan dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan) dan laporan kinerja tahunan (M.Hafzhan 2021).

Laporan kinerja sebenarnya adalah jendela bagi orang luar untuk melihat kinerja dalam organisasi yang melaporkannya. Oleh karena itu, jendela akan memberikan "kesan" Pertama" kepada siapa pun yang menonton. Jika laporan kinerjanya bagus, orang luar tersebut akan berpikir, mungkin saja memang kinerjanya bagus. Dan kesan pertama ini akan sangat melekat, jika tidak ditemui hal yang buruk pihak eksternal tersebut pastilah akan mengira semuanya bagus, semua unit kerja bagus, dan seterusnya. Inilah pentingnya sebuah laporan kinerja, informasi kinerja yang ada di dalamnya haruslah diungkapkan dan disajikan secara baik sesuai dengan tanggung jawab pada tingkatannya (A Imbaruddin, 2019).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah, mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, ringkasan tabel penelitian sebelumnya

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

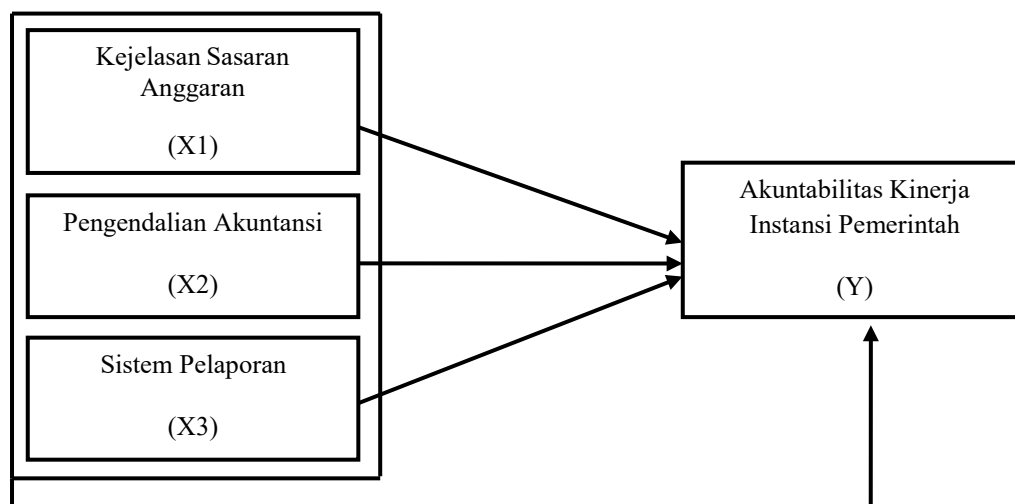
No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	X1 : Kejelasan sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi  X3 : Sistem Pelaporan  Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pengendalian akuntansi Sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2	Rio Pratama, Henri Agustin, Salwa Taqwa (2019)	Pengaruh Pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	X1 : pengendalian akuntansi  X2 : Sistem Pelaporan  X3 : Kejelasan Sasaran Anggaran  Y: Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3	Medelyn Sonya Mikoshi (2020)	Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi, dan sistem Pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja (studi empiris Koni Se Sumatera Barat)	X1 : Kejelasan sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi  X3 : Sistem Pelaporan  Y: Akuntabilitas kinerja (studi empiris Koni se Sumatera Barat)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Koni Sumatera Barat dan sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Koni Sumatera Barat
4	Deni Harianto (2021)	pengaruh kejelasan sasaran anggaran Pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan Pemanfaatan	X1 : Kejelasan sasaran Anggaran  X2: Pengendalian Akuntansi	Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran pengendalian akuntansi sistem pelaporan dan

		teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah (AKIP)	X3 : Sistem Pelaporan X4 : Pemanfaatan teknologi informasi Y : Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah	pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
5	Helin Gustri Mulya, Eka Fauzihardani (2022)	Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel pemoderasi	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dengan kepatuhan Y : Regulasi Sebagai Variabel Pemoderasi	Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel pemoderasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Data : Diolah Oleh Peneliti (2022)

## 2.7 Kerangka Konseptual

Dalam penganggaran juga perlu memahami kejelasan tujuan untuk memudahkan individu dalam menetapkan tujuan anggaran. pencapaian kinerja Manajer yang baik juga harus menggunakan sistem pengendalian akuntansi. Kejelasan tujuan anggaran dan sistem pelaporan yang jelas diharapkan dapat meningkat dengan adanya sistem pengendalian akuntansi Mengelola kinerja khususnya dalam pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah



Gambar 2. 1

### Kerangka Konseptual

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Oleh karena itu perlunya tuntutan akuntabilitas atas instansi pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami instansi harus dipublikasikan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang transparan. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran. Jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Maka kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

***H<sub>1</sub>*: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

**2.8.2 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengendalian akuntansi memungkinkan instansi pemerintah Kabupaten Karo untuk mengontrol dan mengevaluasi semua kegiatan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh instansi tersebut. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan pemerintah ekonomis, efisien, dan efektif dalam memberikan layanan dari lembaga pemerintah daerah kepada masyarakat, yang merupakan indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator-indikator tersebut merupakan capaian yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah terkait. Pengendalian akuntansi juga sebagai faktor penentu tujuan pemerintah daerah. Maka Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

***H<sub>2</sub>*: Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

**2.8.3 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah wajib memberikan keputusan ekonomi, sosial dan

politik oleh pihak yang berkepentingan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten karo dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten karo untuk menjaga kualitas sistem pelaporan keuangan, dengan membuahkan hasil dengan mendapatkan 3 kali opini wajar tanpa pengecualian atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten. Pelaporan merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Dalam memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah melaporkan kinerja secara detail. Dengan demikian, sistem pelaporan yang berjalan baik akan menghasilkan data-data keuangan yang dilaporkan secara detail sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### ***H<sub>3</sub>*: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

#### **2.8.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran. Ketidaktepatan sasaran anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi. Pengendalian akuntansi memungkinkan instansi pemerintah untuk mengontrol dan mengevaluasi semua kegiatan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh instansi tersebut. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Karo masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini dapat diketahui dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun 2020 sampai tahun 2021 memperoleh nilai kurang baik penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintahan Kabupaten Karo masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. laporan akuntabilitas kinerja diasumsikan sebagai tujuan pemerintah daerah, sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan sebagai faktor penentunya. Apabila



faktor-faktor penentu ini secara baik diterapkan di instansi maka tujuan pemerintah daerah akan tercapai.

***H<sub>4</sub>*: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain, Objek dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Desain Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik survei yang bersifat *causal study*. *Causal study* merupakan studi dimana penelitian ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Dalam *causal study*, diperlukan upaya untuk menentukan hubungan sebab akibat melalui jenis analisis korelasional atau regresi tertentu (Grahita Chandarin, 2017: 122). Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik sekelompok orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).

##### 3.1.2 Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Karo. Yang beralamat di Jl. Letjen Jamin Ginting No. 17, Kp. Dalam, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara , 22111

### 3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai. Untuk jelasnya berikut penjelasan waktu penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2022			2023								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	
1	Pengajuan Judul	■											
2.	Pembuatan Proposal		■										
3.	Seminar Proposal			■									
4.	Pengumpulan Data dan Analisis Data					■	■	■	■				
5.	Seminar Hasil									■			
6.	Pengajuan Sidang Meja Hijau										■	■	
7.	Sidang Meja Hijau												■

### 3.2 Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2018) Definisi operasional Variabel adalah suatu atribut atau karakteristik atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki

variasi yang telah ditentukan peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Pengukuran penelitian ini menggunakan skala rasio dengan model skala likert dengan 5 alternatif jawaban. Skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan kuantitas yang absolut dan hasil pengukurannya dapat dipergunakan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan semua prosedur statistik (M.Ramdhan, 2021). Alasan peneliti menggunakan skala rasio yaitu karena memenuhi semua unsur pertanyaan yaitu dapat dikelompokkan, terdapat urutan, terdapat jarak antar kelompok, dan dapat dilakukan perbandingan antar kelompok.

### **3.2.1 Variabel terikat (Dependent Variable)**

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi daya tarik atau fokus peneliti (Grahita Chandarin, 2017:83). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja. Menurut Halim dalam Lusiana Kanji (2016), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan dan hak menuntut pertanggungjawaban.

### 3.2.2 Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, variabel independen dikenal juga sebagai variabel prediksi (predictor variable) (Grahita Chandarin, 2017:83). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Adapun definisi operasional variabel penelitian dijelaskan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Definisi Operasional Variabel Penelitian**

No	Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Y)	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem mempertanggungjawabkan secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) (Nasihudin 2018).	Pemahaman kejelasan sasaran anggaran suatu program  Penetapan visi dan misi dengan rencana strategik organisasi  Penetapan indikator kinerja untuk setiap kegiatan  Analisis keuangan  Pembuatan laporan kegiatan  Pengecekan jalannya program  Pengendalian pelaksanaan kegiatan  Akomodir setiap perubahan pada kegiatan  Kegunaan LAKIP  Kaitan antara pencapaian kinerja dengan program	Skala Rasio

			dan kebijakan	
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut	Kesesuaian rencana kerja dan anggaran RAPBD Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik Keahlian dan pengetahuan Faktor yang mendukung tujuan instansi Ketetapan anggaran dengan realisasi	Skala Rasio
3.	Pengendalian Akuntansi (X2)	Menurut Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019) pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif.	Audit sebagai alat pengambil keputusan Evaluasi sistemtis Target anggran sebagai alat pengambil keputusan Jangka waktu sebagai alat pengambil keputusan Otorasi pada transaksi Bukti pendukung setiap transaksi Pencatatan transaksi Pembaharuan catatan akuntansi Persetujuan laporan keuangan oleh kepala bagian keuangan	Skala Rasio
4.	Sistem Pelaporan	(Sazi Wea,2021) Sistem pelaporan merupakan laporan	Penyajian laporan keunagan secara lengkap	Skala Rasio

	(X3)	yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran).	<p>Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi</p> <p>Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan khusus</p> <p>Laporan keuangan dapat diuji</p> <p>Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya</p>	
--	------	--	---	--

### 3.3 Skala Pengukuran Variabel

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh orang yang melakukan penelitian untuk mengukur suatu fenomena yang terjadi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu daftar periksa pertanyaan tertulis yang dirancang untuk memperoleh data berupa tanggapan responden. Pengukuran menggunakan pengukuran rasio dengan menggunakan skala likert dengan 5 alternatif jawaban, skala likert mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atas sebuah fenomena (Sugiyono, 2018).

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi subjek/objek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya (Chandarin dkk, 2017:125). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Instansi pemerintah Kabupaten Karo yang berjumlah 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat didefinisikan sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.

**Tabel 3. 3**  
**Populasi penelitian**

No	Nama SKPD	Jumlah
1.	Dinas	18
2.	Badan	6
3.	Sekretariat Daerah	1
4.	Sekretariat DPRD	1
5.	Inspektorat	1
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	1
7.	Kecamatan	17
	<b>Total Sampel</b>	<b>45</b>

Sumber : data diolah peneliti (2022)

Dengan demikian, berdasarkan tabel populasi di atas maka diperoleh sampel akhir sebanyak 45 pegawai satuan perangkat kerja daerah yang bertugas di bagian keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing instansi.

### 3.4.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sekelompok atau sebagian dari populasi dan merupakan sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti



(Chandarin, 2017:126). Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode sampel jenuh (sampel sensus) berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Sugiono (2002: 61-63), yang berpendapat bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus.

Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi Menurut (Arikunto 2018:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari populasinya.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada Satuan perangkat Kerja Daerah yaitu sebanyak 45 orang responden. Dengan demikian pengguna seluruh populasi, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan sampel jenuh yang dibantu oleh kuesioner.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini merupakan data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugyono, 2018). Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara *interview* (wawancara). *Kuesioner* (angket), *observasi* (pengamatan) dan

gabungan ketiganya (Sugiyono, 2017:137). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner serta interview di Satuan Perangkat Kerja Kabupaten Karo.

Menurut Sugiyono (2018) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, karena responden hanya perlu menandai satu jawaban yang dianggap benar. Untuk mendukung keperluan penganalisisan dalam penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data, baik dari dalam maupun luar organisasi (Nicholas, 2017:130).

### **3.6 Teknik Kualitas Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa uji analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum dilakukan analisis, akan dilakukan beberapa pengujian, seperti analisis statistik deskriptif dan uji kualitas data.

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang menggunakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian dan lain sebagainya (Ghozli, 2016:150) variabel independen dan dependen penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

### 3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

### 3.6.3 Uji Kualitas Data

Ketepatan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai. Kualitas dalam pengujian tersebut adalah kualitas data penelitian yang ditentukan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan yang berkualitas.

### 3.6.4 Uji Validitas

Menurut (sugiyono, 2018) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, kemudian dilakukan pengujian terhadap instrumen untuk dilakukan pengukuran.

Uji validitas dilakukan terhadap kuesioner yang bertujuan untuk menguji apakah kuesioner yang bertujuan untuk menguji apakah kuesioner layak atau tidak sebagai instrumen penelitian, karena data yang diperoleh dari instrumen yang baik pula, maka diperlukan uji validitas setiap pertanyaan lebih besar ( $>$ ) 0,30 maka

butir pertanyaan dianggap valid. Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*).

### 3.6.5 Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono, 2018) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur yang panjang dari karet adalah contoh instrumen yang tidak reliabel/konsisten uji reliabilitas merupakan tingkat kepenelitian suatu instrumen penelitian. Realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih besar ( $>$ ) 0,60.

### 3.7 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat syarat lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2016:165), yang terdiri dari :

#### 3.7.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengamsumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Untuk mendeteksi normalitas dengan uji statistik, ketentuan dalam pengambilan keputusan adalah :

Nilai sig  $<0,05$ , distribusi adalah tidak normal.

Nilai sig  $>0,05$ , distribusi adalah normal.

### 3.7.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikolinieritas atau tidak. Multikolinieritas adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas perlu dilakukan jika jumlah variabel independen (variabel bebas) lebih dari satu. Ada beberapa cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas, sebagai berikut:

1. Jika nilai *Variance Inflation Facktor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.
2. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0.70 maka model dapat dikatakan bebas dari asumsi klasik multikolinieritas. Jika lebih dari 0,70 dikatakan terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel independen sehingga terjadi multikolinieritas.

### 3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Widarjono, 2016:85). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians da residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut *homoskedastisitas*.

Deteksi *heteroskedastisitas* dapat dilakukan dengan metode *Scatter plot* dengan memlotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpulkan ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit (Widarjono, 2016:86-93). Dasar analisisnya adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.8 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban teoritis yang terdapat dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut didukung oleh fakta-fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data.

### 3.8.1 Uji Statistik (Uji T)

Uji t menurut Imam (Ghozali, 2016) menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel terkait. Uji t yang dilakukan secara parsial dengan cara sebagai berikut :

Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya hubungan pengaruh variabel bebas memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabelterkait dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel.

Pengujian hipotesis secara statistik dilakukan dengan menggunakan uji t. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel masing-masing independen, maka dibandingkan dengan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta membandingkan nilai signifikan t dengan level of signifikan pada tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 0.05 atau 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $>0,05$ , maka  $H_0$  dapat diterima dan  $H_a$  ditolak (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabeldependen.
2. Jika nilai signifikan  $<0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.8.2 Uji Kelayakan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji kesesuaian model (*Goodness of Fit*). Sehingga dapat dilihat apakah model termasuk dalam kategori cocok atau tidak. Uji f statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kriteria dari uji simultan adalah sebagai berikut:

1. Jika  $F_{Hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika  $F_{Hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### 3.8.3 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Begitu juga mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi parsial. Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi parsial yang paling besar adalah variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
3. Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
4. Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Praktis

Diharapkan praktis dapat belajar mengenai penulisan karya ilmiah yang sesuai, dan dapat membantu peneliti untuk lebih memahami pentingnya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten karo.

### 2. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan yang jelas dapat meningkatkan kinerja manajerial khususnya pada pemerintah kabupaten karo guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

### 3. Bagi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan terutama bagi Pemerintahan daerah Kabupaten Karo dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam menyangkut kejelasan sasaran anggaran untuk menciptakan sasaran anggaran yang jelas, pengendalian akuntansi yang efektif dan efisien, dan sistem pelaporan yang baik guna

memenuhi terciptanya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang menyangkut topik yang sama mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah (2019). *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (1), 429-444.
- Ade Wahyu Azhar, S.Pd., M.A.P , Hasman Nasrun, S.Pd., M.Si. (2020). *Menulis laporan penelitian bagi peneliti pemula*. Sumatera Barat: CV. Insan Cendaka Mandiri.
- Alexander Anggono , (2020). *Akuntansi manajemen pada entitas publik*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata
- ALIM, A. F., & Wahyu, P. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kesenjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi dan Self Esteem Sebagai Variabel Moderasi* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Arfian. (2016). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Arya Kusuma (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang) Periode 2017-2019*.
- Atika Hasanah. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Aziz, F. (2023). *PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO)* (Doctoral dissertation, STIE Bank BPD Jateng).
- Bastian (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan: perspektif value for money*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 4(10).
- BIMA, P. D. S. K., ( 2022). *Akuntabilitas Anggran Covid19*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Darma (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 204-219.

- Deni Harianto (2021). *Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan)*.
- Depari, R. P. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)*.
- Devika Diah Precelina (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Manajerial aparat pemerintahan (studi kasus pemerintah daerah indramayu)*. *Jurnal Tekun Universitas Mercu Buana*, 7(01), 62-79.
- Diamonalisa, Nunung Nurhayati, Dani Rahman, (2022). *Mengolah data penelitian dengan SPSS*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Edipson Bayer Silalahi (2017). *Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Permerintah Kota Makassar*. *Tangible Journal*, 3(2), 169-183.
- Fauzan, R. H., Nasir, A., & Silalahi, S. P. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provin (Doctoral dissertation, Riau University)*.
- Ghozali (2016). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderating Pada SKPD Kabupaten Pohuwato*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 1-21.
- Indudewi (2021). *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Empiris pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura*. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju)*, 2(2), 62-71.
- Indra F, Bagiana, (2021) *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Konsep dan Implementasi)*. Jakarta.
- Indra bastian, SE. Akt, M.B.A, Ph. , (2018). *Akuntansi Pendidikan*. Surabaya

- Kartikahadi, Hans (2021). Kanji, L. (2016). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*. Jurnal Ilmiah Bongaya, 1(1), 73-92.
- Khaismawati (2023). *PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO)* (Doctoral dissertation, STIE Bank BPD Jateng).
- Mardisar (2017). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal telaah dan riset akuntansi, 6(2), 150-174.
- Mertyani Sari Dewi. (2020). *Manajemen*. UGM PRESS
- Mardiasmo (2019). *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 429-444.
- Mulyadi (2019). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 15.
- M. Fuad dkk, (2020). *Anggaran perusahaan konsep dan aplikasi*. Jakarta.
- muhammad hafzhan, (2021). *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada badan pengelola keuangan dan aset daerah)*. universitas islam negeri sumatera utara medan
- Nasihudin (2018). *PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA UTARA)*. JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 7(2), 172-181.
- Nikolaus Duli. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif beberapa Konsep Dasar untuk Penulis Skripsi & Analisis data dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Nur Anisa (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016*. Jurnal Al-Iqtishad, 14(1), 20-37.
- Pusdiklatwas BPKP, (2015). *Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi*

- Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 2(01), 89-96.*
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Paramitha, I. A. M. D. (2016). *pengaruh ketepatan sasaran anggaran, sistem pengendalian manajerial sektor publik dan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja.* E-Jurnal Akuntansi, 16(3), 2457-2479
- Putra (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.* *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1068-1079.*
- Putra, B. A., Hasan, A., & Yasni, H. (2016). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Skpd Bengkalis)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ramadhani (2022). *PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DALAM UPAYA REVITALISASI PERAN HUMAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Ramandei, P. (2017). *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Retnowati, dkk. (2020). *Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia).* *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi, 7(1), 11-21.*
- risky prayoga depari, (2021) *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada organisasi perangkat daerah (opd) . pekanbaru : universitas islam negeri sultan syarif kasim riau*
- Safitri, N. H. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten*

- Kebumen*) (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta).
- Selmita Paranoan, (2022). *Akuntabilitas kinerja sektor publik*. Jawa barat : CV. Media Sains Indonesia.
- Setiawan (2020). *pengaruh realisasi anggaran, pengendalian akuntansi, dan efisiensi anggaran terhadap akuntabilitas pada dinas pekerjaan umum kota surabaya*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7).
- Sugiyono (2018). *pengaruh akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (survey pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintah kota bandung)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- SUPARDI, S. (2016). *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah provinsi dki jakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
- Supriyino (2018). *Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Susilo (2019). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota jambi*. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Sains*, 13(2), 31-36.
- sutrisno hadi (2017). *Statistik Parametrik*. PT Elexmedia Komputindo. Jakarta.
- Suwandi 2019). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah)*. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 2(2), 1-13.
- Wahyuddin Darmalaksana, M.Ag. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*. Bandung.
- Wati (2016). *Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran Anggaran, desentralisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).



- WEA, S. A. (2021). *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah* (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS FLORES).
- Widya Restu (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 3(2), 1-14.
- Winda Dwi Lestari, (2017). *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah daerah kabupaten tangerang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- WIBOWO, S. K. D. B. B. (2021). *pengaruh anggaran daerah berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten sukoharjo* (doctoral dissertation, universitas atma jaya yogyakarta).



**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,  
PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM  
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo)**

**KUESIONER**

**OLEH :  
DEBY FEBRIANI  
198330014**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/23

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

### UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program strata satu (S1)

Universitas Medan Area

**Nama : Deby Febriani**

**Npm 198330014**

**Stambuk 2019**

**Fak/Prodi : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi A1**

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul

**“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo)”**

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk digunakan sebagai penelitian kinerja ditempat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari bekerja, sehingga saya akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kode etika penelitian. Peneliti sangat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/23

mengharapkan kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan saudara. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

### **Petunjuk Pengisian**

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda ceklis (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia pada tabel sesuai dengan pendapat bapak/ibu dan mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis. Adapun keterangan alternatif jawaban dan bobot nilai yang dapat dipilih sebagai berikut:

- SS = Sangat Setuju (5)  
S = Setuju (4)  
KS = Kurang Setuju (3)  
TS = Tidak Setuju (2)  
STS = Sangat Tidak Setuju (1)

Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini. Setelah mengisi kuesioner ini mohon bapak/ibu dapat mengembalikan kembali pada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.

### **IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

Jenis Kelamin : Pria  Wanita

Usia : < 25 Tahun  25-35 Tahun

36-50 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

D3

S1 S2 

Jabatan : .....

Lama Berkerja : < 5 Tahun 5-10 Tahun 5-15 Tahun **Kejelasan Sasaran Anggaran**

No	Pertanyaan	Penilaian				
		STS	TS	KS	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pada instansi tempat saya bekerja, tujuan rencana kerja dan anggaran telah disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBD).					
2	Pada instansi tempat saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas, spesifik dan terstruktur.					
3	Pada instansi tempat saya bekerja, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran (RBA).					
4	Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang dapat membantu atau mendukung tujuan-tujuan instansi secara efektif dan efisien.					
5	Tempat instansi saya bekerja, jumlah anggaran yang disusun sama dengan jumlah anggaran yang direalisasikan serta digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif dan efisien.					

### Pengendalian Akuntansi

No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	KS	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pada instansi tempat Saya bekerja, audit atau pemeriksaan intern digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
2	Pada instansi tempat Saya bekerja, evaluasi yang sistematis dan terjadwal tidak digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
3	Pada instansi tempat Saya bekerja, penetapan target anggaran digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
4	Pada instansi tempat Saya bekerja, rencana jangka pendek dan jangka panjang digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
5	Pada instansi tempat Saya bekerja, transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.					
6	Setiap transaksi yang terjadi pada instansi tempat Saya bekerja telah didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.					
7	Pada instansi tempat Saya bekerja, setiap transaksi telah dicatat dalam buku catatan akuntansi.					
8	Pada instansi tempat Saya bekerja, catatan akuntansi dijaga untuk tetap "up-to-date".					
9	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan.					

### Sistem Pelaporan

No	Pertanyaan	Penilaian				
		STS	TS	KS	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan keuangan telah disajikan secara lengkap.					
2	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat Saya bekerja, telah memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.					
3	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.					
4	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi keuangan pada laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji					
5	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tempat Saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					

### Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	KS	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat/pegawai dan pemimpin.					
2	Visi dan misi program instansi tempat Saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
3	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.					



4	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.					
5	Pada instansi tempat Saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan.					
6	Tempat instansi Saya bekerja, telah dilakukan pengecekan terhadap jalannya program/kegiatan yang sedang dilaksanakan.					
7	Pada instansi tempat Saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					
8	Kegiatan/program yang disusun oleh instansi tempat Saya bekerja telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					
9	Pada instansi tempat Saya bekerja, LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					
10	Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					

**Lampiran 2. Data Hasil Penelitian.****Tabulasi Jawaban Responden**

DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL										
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Y)										
P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	P.9	P.10	Y
4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	45
5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	40
4	4	5	4	2	2	4	4	4	3	36
5	5	5	3	2	2	2	2	2	2	30
5	3	3	3	4	3	4	4	5	5	39
2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	22
5	5	4	3	5	5	5	5	4	3	44
4	4	4	3	4	3	4	4	5	3	38
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
4	3	3	3	5	4	5	5	5	3	40
3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	36
2	3	3	2	5	5	5	5	5	4	39
4	4	3	4	4	5	4	4	4	5	41
5	5	5	5	4	5	5	5	3	3	45
3	2	2	1	4	4	5	5	3	3	32
2	2	2	2	4	4	5	5	4	4	34
5	5	5	1	2	2	2	2	2	2	28
5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	46
4	3	3	4	5	5	5	4	5	4	42
3	3	3	3	5	5	5	5	4	3	39
3	5	3	3	3	3	3	3	2	2	30
4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	45
5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
5	5	5	3	5	5	5	4	2	4	43
3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	37
5	5	5	5	2	2	1	2	2	2	31
3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	35
4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	47
3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	42
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42

3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38
5	3	2	4	5	5	5	5	2	2	38
4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	37
4	3	3	3	4	4	4	4	2	2	33
1	1	1	1	5	5	5	5	4	3	31
4	2	3	1	4	4	4	4	4	4	34
3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	45
4	3	4	1	5	5	5	5	5	5	42
1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	20
3	3	3	2	5	5	5	5	5	4	40
5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	45
3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	38
2	3	3	3	5	4	4	4	4	3	34

DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X1)					
P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	X1
4	4	5	5	4	22
4	5	5	5	4	23
4	5	5	5	4	23
2	3	3	2	2	12
2	5	5	4	4	20
2	2	2	2	3	11
4	4	5	5	5	23
4	5	5	5	4	23
5	4	4	5	5	23
4	4	5	5	5	23
4	4	4	4	4	20
2	2	3	4	5	16
4	5	5	5	4	23
2	2	2	3	2	11
2	3	2	3	4	14
2	2	2	2	2	10
2	2	2	1	4	11
3	2	3	3	5	16

2	2	3	2	5	14
3	3	5	4	5	20
3	3	3	4	3	16
3	5	5	5	5	23
4	5	5	5	5	24
4	5	5	4	5	23
4	4	5	4	4	21
5	5	5	5	2	22
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	5	21
4	5	5	5	4	23
4	4	5	5	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	4	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
2	2	1	2	2	9
2	4	5	5	4	20
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5	5	25
2	1	2	2	4	11
4	4	4	4	5	21
4	5	5	4	5	23
4	4	4	4	5	21
4	4	5	4	5	22

DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL PENEGENDALIAN AKUNTANSI (X2)									
P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	P.9	X2
4	5	4	5	4	4	4	4	4	38
5	5	2	4	4	4	4	5	4	37
3	5	4	4	3	3	3	3	5	33
2	1	5	2	3	2	2	3	3	23
3	4	4	4	3	3	5	5	5	36
2	3	3	2	3	2	2	2	2	21

3	3	4	4	2	5	5	5	4	<b>35</b>
4	4	4	4	4	3	4	4	4	<b>35</b>
5	5	5	5	2	4	5	5	5	<b>41</b>
2	5	5	4	2	4	5	5	5	<b>37</b>
3	3	2	3	4	4	4	4	4	<b>31</b>
2	3	3	2	5	5	5	5	4	<b>34</b>
2	5	4	5	4	5	4	5	4	<b>38</b>
5	5	5	5	4	5	5	4	4	<b>42</b>
2	3	4	5	4	4	5	4	4	<b>35</b>
2	2	5	4	4	4	5	4	3	<b>33</b>
5	2	1	2	4	4	4	4	4	<b>30</b>
5	5	5	5	5	5	5	3	3	<b>41</b>
5	5	5	4	5	5	5	4	4	<b>42</b>
4	5	5	5	5	5	5	5	4	<b>43</b>
5	4	4	5	3	3	3	3	4	<b>34</b>
5	4	5	5	5	5	5	5	5	<b>44</b>
5	5	4	4	5	5	5	4	4	<b>41</b>
2	2	2	2	5	5	5	5	3	<b>31</b>
2	2	5	5	4	4	4	4	4	<b>34</b>
5	5	5	5	2	2	1	4	5	<b>34</b>
4	5	5	5	4	4	4	4	4	<b>39</b>
5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>45</b>
5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>45</b>
5	5	4	4	4	4	4	4	4	<b>38</b>
4	4	4	5	3	3	3	4	4	<b>34</b>
5	5	5	5	4	4	3	4	4	<b>39</b>
4	3	3	3	4	4	4	3	4	<b>32</b>
5	5	4	5	5	5	5	4	3	<b>41</b>
4	3	3	4	4	4	4	4	4	<b>34</b>
5	4	4	5	4	4	4	4	2	<b>36</b>
1	2	2	1	5	5	5	5	4	<b>30</b>
4	4	4	4	4	4	4	4	4	<b>36</b>
4	4	5	5	5	5	5	5	5	<b>43</b>
4	4	3	4	5	5	5	5	5	<b>40</b>
5	2	5	5	4	4	4	4	4	<b>37</b>
4	4	5	4	5	5	5	5	4	<b>41</b>
4	5	4	4	5	4	4	5	4	<b>39</b>
5	5	5	4	5	4	4	4	4	<b>40</b>

2	2	2	2	5	4	4	4	4	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL SISTEM PELAPORAN (X3)					
P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	X3
5	4	5	4	4	22
5	5	5	5	3	23
3	4	4	5	3	19
4	3	3	3	4	17
4	4	3	3	4	18
3	3	2	3	3	14
4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	4	3	4	21
4	2	4	4	3	17
5	5	3	3	3	19
4	4	3	4	3	18
4	5	5	5	5	24
2	4	4	2	4	16
2	3	2	3	3	13
2	2	3	2	2	11
5	5	5	5	5	25
3	3	4	3	3	16
3	3	3	3	2	14
4	4	3	3	3	17
4	3	3	2	3	15
5	4	4	4	4	21
2	2	2	5	2	13
3	3	3	3	4	16
5	5	5	5	5	25
3	3	5	3	3	17
3	2	3	2	5	15
5	3	3	3	3	17
4	5	5	5	4	23
4	3	5	5	4	21
4	4	4	4	3	19

3	4	5	5	4	21
5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	4	20
2	2	2	2	4	12
3	4	4	4	2	17
3	3	4	5	2	17
3	4	4	4	4	19
5	4	5	5	3	22
2	3	3	3	1	12
3	4	4	3	3	17
4	5	5	4	3	21
4	4	4	4	5	21
3	4	5	4	4	20

### LAMPIRAN 3. Hasil Pengolahan Data

#### ➤ Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
<b>Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)</b>			
X1_1	0,810	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_2	0,756	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_3	0,730	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_4	0,636	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_5	0,808	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
<b>Pengendalian Akuntansi (X2)</b>			
X2_1	0,770	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_2	0,751	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_3	0,818	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_4	0,806	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_5	0,843	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_6	0,856	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_7	0,863	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_8	0,716	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_9	0,641	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
<b>Sistem Pelaporan (X3)</b>			
X3_1	0,857	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_2	0,865	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_3	0,850	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)

X3_4	0,857	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_5	0,660	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
<b>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)</b>			
Y_1	0,807	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_2	0,842	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_3	0,868	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_4	0,863	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_5	0,935	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_6	0,944	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_7	0,935	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_8	0,863	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_9	0,877	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_10	0,859	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)

➤ **Hasil Uji Reliabilitas**

**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah item (n)	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,798 > 0,7	5	Reliabel
Pengendalian Akuntansi (X2)	0,920 > 0,7	9	Reliabel
Sistem Pelaporan (X3)	0,878 > 0,7	5	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y)	0,967 > 0,7	10	Reliabel

➤ **Hasil Uji Normalitas**

- Kolmogorov Smirnov test

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.91284463
Most Extreme Differences	Absolute	.133

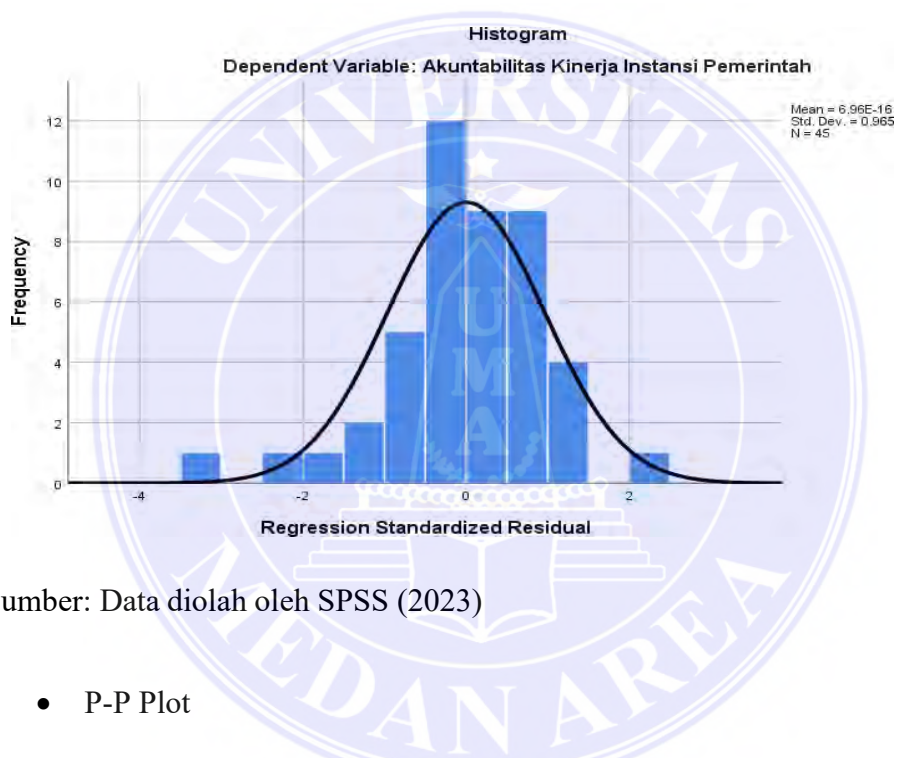


	Positive	.080
	Negative	-.133
Test Statistic		.133
Exact Sig. (2-tailed)		.366

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

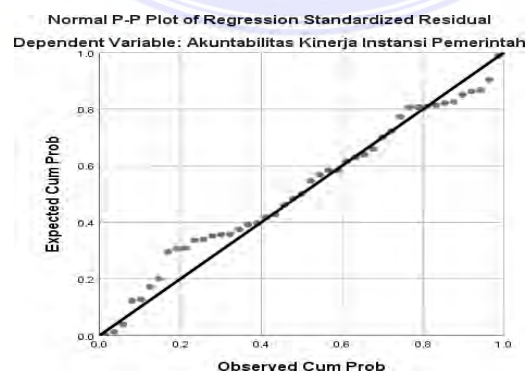
Sumber : data diolah oleh SPSS (2023)

- Histogram



sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

- P-P Plot



Sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

➤ Hasil Uji Multikolinearitas

**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.113	4.762		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.370	.160	.709	1.411
	Pengendalian Akuntansi	.613	.127	.837	1.194
	Sistem Pelaporan	.402	.186	.786	1.272

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : data diolah oleh SPSS (2023)

➤ Hasil Uji Heteroskedastisitas

- Uji Statistik dengan Glejser

**Uji Glejser**

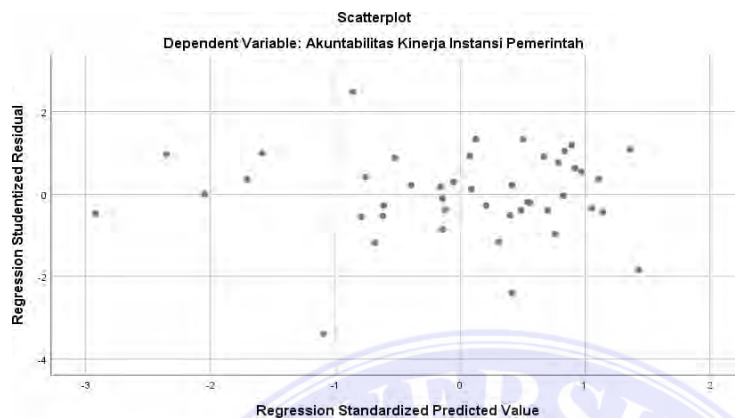
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.375	3.092		.768	.447
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.112	.104	-.197	-1.083	.285
	Pengendalian Akuntansi	.070	.083	.143	.853	.399
	Sistem Pelaporan	.008	.121	.011	.062	.951

a. Dependent Variable: abs\_res

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

- *Scatterplot*



Sumber: data diolah oleh SPSS (2023)

➤ Hasil Uji Analisis Linier Berganda

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.113	4.762		.234	.816
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.370	.160	.267	2.312	.026
	Pengendalian Akuntansi	.613	.127	.511	4.816	.000
	Sistem Pelaporan	.402	.186	.236	2.156	.037

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : data diolah oleh SPSS (2023)

➤ **Hasil Uji Hipotesis**

- Hasil Uji Parsial (Uji t)

**Uji Signifikan Secara Parsial (Uji-t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
		B	Std. Error				
1	(Constant)	1.113	4.762			.234	.816
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.370	.160	.267		2.312	.026
	Pengendalian Akuntansi	.613	.127	.511		4.816	.000
	Sistem Pelaporan	.402	.186	.236		2.156	.037

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data diolah Oleh SPSS (2023)

➤ **Hasil Uji Simultan (Uji F)**

**Uji Signifikan Secara Serempak (Uji-F)**

Model		ANOVA <sup>a</sup>				Sig.
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	
1	Regression	1069.989	3	356.663	21.707	.000 <sup>b</sup>
	Residual	673.656	41	16.431		
	Total	1743.644	44			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber : Data diolah oleh SPSS (2023)

➤ Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

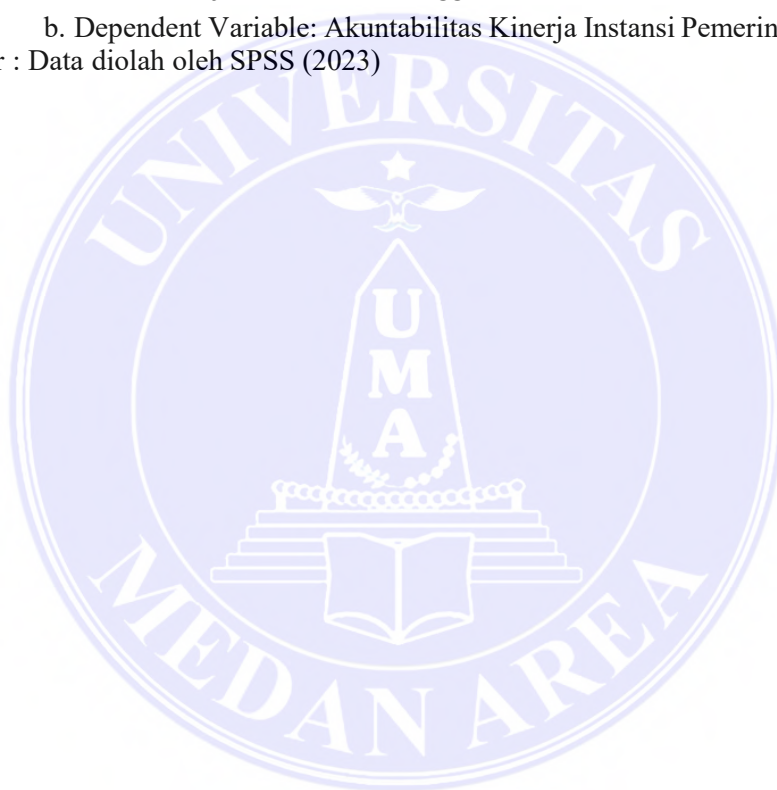
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 <sup>a</sup>	.614	.585	4.053

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data diolah oleh SPSS (2023)



## Lampiran 4: Tabel R

## Tabel r

Tabel r untuk  $df = 1 - 45$ 

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541

31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647

### Lampiran 5 : Tabel T

#### Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 45)

Df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496

24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01800	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.30155	2.01699	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.30109	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.30065	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148

Lampiran 6 : Tabel F

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72



12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas : ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 089 /FEB/A/02.2/B/ II /2023  
Lamp :  
Perihal : Izin Research

13 Februari 2023

Kepada Yth,  
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karo

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

**N a m a** : DEBY FEBRIANI  
**N P M** : 198330014  
**Judul** : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( Studi Emperia Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo ) Di Medan

Untuk mengeluarkan surat keterangan selasai riset pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang  
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JLN. DJAMIN GINTING NO. 17 KABANJAHE - 22113

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/000/BAPENDA/2023  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Keterangan Telah Selesai  
Penelitian/Riset

Kabanjahe, 10 April 2023  
 Kepada Yth:  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan  
 Bisnis Universitas Medan Area  
 di-  
Medan

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Nomor: 089/FEB/A/02.2/B/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 perihal Izin Riset, serta tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Karo dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor: 300/0341/Bakesbang/2023 tanggal 09 Maret 2023 perihal Rekomendasi, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa atas nama :

NO	NAMA	NPM
1	DEBY FEBRIANI	198330014

Nama tersebut diatas benar telah selesai melaksanakan Penelitian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Karo mulai tanggal 09 Maret s/d 09 April 2023 dengan baik khususnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabanjahe, 10 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**



Petrus Ginting, S.Sos  
**REMBINA UTAMA MUDA**  
 NIP. 19690318 199009 1 001